

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak demi meningkatkan kesejahteraan kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai warga negara hukum seperti Indonesia, kita terikat oleh hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Warga diminta untuk sepenuhnya mematuhi pedoman ini. Terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat merupakan tujuan dari undang-undang tersebut. Akan ada sanksi berat bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut.

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan demi meraih masa depan yang terjamin. Kehidupan manusia, dari dalam kandungan sampai kematian, tidak dapat dipisahkan dari konsep pendidikan karena manusia belajar dari kehidupannya itu sendiri. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan kepribadian manusia yang baik, baik jasmani maupun rohani, adalah pendidikan. Selain itu, beberapa profesional menafsirkan melalui instruksi dan pelatihan, pendidikan adalah proses mengubah pandangan dan perilaku seseorang atau kelompok saat mereka dewasa. Standar hidup yang baik atau tinggi tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi mendapatkan pendidikan yang layak juga menjadi standar kehidupan yang baik. Pendidikan memiliki pengaruh yang begitu besar bagi kita dan karena dapat memberantas

buta huruf dan memberi kita keterampilan, kapasitas mental, dan hal-hal lain, itu dapat membantu kita menjadi lebih dewasa.

Pendidikan tinggi adalah sumber pendidikan tinggi, yang berfungsi sebagai blok bangunan terakhir dari semua tingkat pendidikan. Menurut Ramdhani dan Suryadi (2006), perguruan tinggi merupakan organisasi yang tugas utamanya memajukan ilmu pengetahuan. Ia juga bertugas menciptakan generasi muda yang mampu mengatasi hambatan di era globalisasi saat ini. Generasi muda yang dihasilkan di perguruan tinggi maupun mahasiswa saat ini memainkan peran penting dalam memilih cara di mana negara ini akan maju. Untuk dapat berkontribusi dalam proses pembangunan dan memajukan negara, siswa harus memiliki kapasitas kemampuan yang di atas rata-rata mayoritas kelompok lain.

Memperoleh pendidikan yang berkualitas tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, hal ini lah yang membuat banyak anak-anak di Indonesia yang tidak bersekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Stigma pemikiran masyarakat Indonesia yang berfikir bahwa jika tidak memiliki biaya, maka tidak bisa melanjutkan pendidikan, membuat semakin banyaknya masyarakat yang tidak berpendidikan. Berdasarkan Kemenristekdikti, dilansir dari <https://bogorkab.go.id> terdapat 65% lulusan SMA/SMK tidak meneruskan pendidikan ke jenjang kuliah, maka dapat dikatakan masyarakat Indonesia yang menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih rendah dan baru mencapai 34.58% dari populasi pendidikan.

Pemikiran mengenai tidak bisa lanjut pendidikan karena tidak ada biaya sudah seharusnya dihilangkan, karena saat ini semua orang bisa bersekolah

dengan bantuan beasiswa. Beasiswa sendiri bisa datang dari pemerintah maupun dari swasta. Peraturan perundang-undangan berikut memberikan kerangka hukum untuk beasiswa: Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2015:2).

Beasiswa memiliki jenis yang beragam, mulai dari beasiswa PPA, Beasiswa BBM, Beasiswa Bidik Misi dari Dirjen Dikti, Beasiswa Pemda dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan provinsi, Beasiswa dari Bazda dan Baznas, Beasiswa Prestasi akademik dari Yayasan Pendidikan PDRI Padang Sumatera Barat, Beasiswa Supersemar dari Yayasan Supersemar, dan Beasiswa dari PT. Bank Syariah Mandiri. Bagi mahasiswa kurang mampu namun berprestasi akademik dengan IPK minimal 3,00, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi menawarkan beasiswa Pemda (UPGRISBA, 2022).

Dalam rangka menggerakkan dan mendorong peningkatan sektor ekonomi, Kabupaten Bogor telah menetapkan pembangunan sektor pendidikan sebagai prioritas. Hal ini merupakan komponen inisiatif untuk meningkatkan sumber daya manusia, yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan agar melalui pendidikan akan tercipta orang-orang baik yang akan mendukung sosial budaya, pembangunan ekonomi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Karena

ukurannya yang besar dan demografi usia yang didominasi anak muda, Kabupaten Bogor memiliki kewajiban besar untuk memastikan bahwa anak-anak menerima pendidikan yang berkualitas. Seiring dengan masalah kependudukan, persebaran penduduk tersebut juga berdampak pada bagaimana pendidikan dikembangkan di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor, terdapat kesenjangan besar dalam penyediaan lembaga pendidikan. Sekolah di kota sering kali berkualitas tinggi dan dijalankan secara mandiri. Kehadiran sekolah berkualitas tinggi di lokasi metropolitan menyiratkan bahwa biaya kuliah di lembaga-lembaga ini cukup tinggi. Di sisi lain, pelaksanaan proses pendidikan di beberapa tempat masih terpusat pada perluasan cakupan atau belum berkembang pada peningkatan kualitas.

Pada tahun 2021 angka usia pemuda di Kabupaten Bogor mulai usia 16 tahun sampai 30 tahun sebanyak 1,32 juta orang dengan angka peserta didik Tingkat Menengah Atas (SMA, SMK, dan MA negeri dan swasta) sebesar 220.200 orang dan 31.221 orang merupakan angka mahasiswa pendidikan tinggi negeri dan swasta. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Kabupaten Bogor berada diatas APK Provinsi Jawa Barat, tetapi masih berada dibawah angka nasional dengan perolehan 25,02% untuk APK Pendidikan Tinggi Kabupaten Bogor, 21,09% untuk APK Pendidikan Tinggi Jawa barat, dan 34,8% APK Pendidikan Tinggi Nasional (Pemerintah Kota Bogor, 2021).

Di Kabupaten Bogor terdapat program Pancakarsa yang dicetuskan oleh bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin diperiode kepemimpinannya tahun 2018-2023 dan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-

2023. Terdapat lima tekad, yaitu Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun, dan Karsa Bogor Berkeadaban. Peningkatan kualitas hidup warga Kabupaten Bogor merupakan salah satu upaya pemerintah. Upaya ini membutuhkan kerja sama tim, terutama dari kalangan muda. Agar generasi muda memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pembangunan masyarakat, penting untuk mendukung pendidikan mereka dan memanfaatkan kemampuan dan potensi mereka. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan Beasiswa Pancakarsa sebagai pintu gerbang pendidikan tinggi bagi generasi muda cerdas dari Bogor. Beasiswa Pancakarsa merupakan salah satu upaya Pemerintahan Kabupaten Bogor untuk merealisasikan salah satu karsa dari Pancakarsa Kabupaten Bogor yaitu Karsa Bogor Cerdas.

Peningkatan taraf hidup warga Kabupaten Bogor merupakan sebuah tugas besar yang memerlukan upaya kelompok, khususnya dari generasi muda. Pendidikan generasi muda perlu ditingkatkan dan diperhatikan kemampuan serta potensinya agar dapat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pembangunan sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor mendirikan Beasiswa Pancakarsa sebagai pintu gerbang studi lanjut bagi generasi muda berprestasi di Bogor.

Pemerintah Kabupaten menjalankan program beasiswa bernama Beasiswa Pancakarsa. Bogor untuk kaum muda Kabupaten Bogor, termasuk mereka yang akan memulai dan mereka yang sedang menempuh pendidikan sarjana, berusia 16 hingga 30 tahun. Besaran beasiswa dibatasi sebesar Rp10.000.000 setiap semester

dan disesuaikan dengan UKT di masing-masing universitas mitra. Beasiswa diberikan sampai dengan 8 (delapan) semester, atau sampai lulus dengan minimal IPK 3.50 persemesternya. Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa mengawal beasiswa secara terbuka dan tidak memihak (TKPBP). TKPBP dibentuk sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 422.5/573/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa Bagi Pemuda dengan Prestasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 100). Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi TKPBP yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Sekretariat dijalankan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Beasiswa Pancakarsa harus direncanakan, dikelola, dipantau, dan dievaluasi oleh TKPBP.

Program beasiswa Pancakarsa Kabupaten Bogor yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Bogor telah terlaksana mulai dari tahun 2021. Nina Nurmasari selaku kepala bidang kepemudaan DISPORA kabupaten Bogor mengatakan bahwa Rp 5.900.000.000 telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota Bogor melalui APBD tahun 2021 yang digunakan sebagai Beasiswa Pancakarsa untuk seluruh penerima beasiswa tersebut. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan 1.200 beasiswa kuliah untuk pemuda-pemudi berprestasi Kabupaten Bogor hingga lulus jenjang S1 di seluruh universitas negeri dan swasta di Indonesia. Penerima

Beasiswa Pancakarsa dipilih melalui Keputusan Bupati, dan wajib menandatangani Kontrak Studi dan Pakta Integritas. Website Beasiswa Pancakarsa dan media cetak/online mempublikasikan nama-nama calon penerima Beasiswa Pancakarsa 2021 yang telah dipilih oleh Bupati. Dana dari Beasiswa Pancakarsa disalurkan sesuai Perjanjian Kerja Sama dengan perguruan tinggi mitra yang diakui dan ditransfer langsung ke rekening bank penerima beasiswa.

Dengan adanya program beasiswa Pancakarsa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Pemuda dan Olahraga diharapkan dapat terus berjalan dan memberikan bantuan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Kabupaten Bogor dalam hal biaya kuliah, yang nantinya akan melahirkan sumber daya manusia yang memadai di Kabupaten Bogor. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti telah melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Beasiswa Pendidikan Pancakarsa di Kabupaten Bogor Tahun 2022”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Beasiswa Pancakarsa di Kabupaten Bogor tahun 2022?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi program Beasiswa Pancakarsa di Kabupaten Bogor pada tahun 2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisa lebih lanjut mengenai implementasi Beasiswa Pancakarsa di Kabupaten Bogor tahun 2022.

2. Menganalisa hambatan apa saja yang ada dalam implementasi program Beasiswa Pancakarsa di Kabupaten Bogor tahun 2022.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi sarana pembelajaran dan menambah wawasan terutama terkait Implementasi Program Beasiswa Pancakarsa di Kabupaten Bogor.
2. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini bisa menjadi wadah ilmu dan informasi yang lebih mendalam terkait Program beasiswa Pancakarsa di Kabupaten Bogor.
3. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan akan memajukan pemahaman kita tentang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu politik dan pemerintahan.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan mengenai bagaimana implementasi kebijakan beasiswa daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah demi mengembangkan kualitas pendidikan.

#### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berguna bagi peneliti sebagai sebuah acuan dalam melakukan suatu penelitian sehingga nantinya akan memperluas pengetahuan peneliti, serta memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian yang telah digunakan. Penelitian terdahulu juga berguna sebagai acuan untuk



membandingkan dan membedakan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan atau penelitian terbaru.

Pada bagian ini, peneliti meringkas penelitian baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan setelah membuat daftar temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya yang tercantum di bawah ini masih relevan dengan subjek yang sedang diteliti oleh penulis.

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Teori	Temuan
1	Amalia Nurhabibah (2022)	Efektivitas implementasi program beasiswa Karawang Cerdas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang	Kualitatif	Teori Implementasi Riant Nugroho	Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan program beasiswa Karawang Pintar secara efektif karena dilatarbelakangi oleh tujuan kinerja dan praktik manajemen yang kurang baik. Namun, secara keseluruhan Program Beasiswa Cerdas Karawang telah berhasil di Kabupaten Karawang karena kemampuan pemerintah daerah untuk berinovasi dan mengembangkan kebijakan yang diterapkan dalam mewujudkan kesempurnaan misi pemerintah dengan mencapai tujuan sebagai proses penyempurnaan akhir.
2	Maghfira Fitri Maulani (2018)	Implementasi Program Penyaluran Beasiswa (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kualitatif	Teori Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn	Implementasi program bantuan SPP Gratis di Kabupaten Pangkep sudah cukup baik, namun masih perlu adanya perbaikan pada beberapa faktor seperti, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi dari para pelaksana program, dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial.
3	Lisa Azmi Lubis (2022)	Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lahanbatu Utara	Kualitatif	Teori Implementasi George C. Edward III	Dapat disimpulkan dari Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Miskin Berprestasi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa Bagian Kesejahteraan Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara bertanggung jawab untuk melaksanakan beasiswa ini di lingkungan Kantor Camat dan bahwa komunikasi atau penyampaian kebijakan telah berhasil, tetapi tidak dengan mereka yang tidak menerimanya. Dari sisi sumber daya manusia, implementasi kebijakan pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu yang berprestasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Labuhanbatu Utara belum

					berjalan dengan baik. Tetapi dalam hal sumber daya dalam kelangsungan pemberian beasiswa daerah dalam hal jumlah tenaga kerja yang menjalankan tugasnya sudah dapat dikatakan baik.
4	Alpriyansyah Marla (2022)	Implementasi Kebijakan Pemberian SPP Gratis Bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan	kualitatif	Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis Bagi Pelajar di Kabupaten Pangkep merupakan Program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep yang dilakukan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengembangkan disiplin keilmuan, meningkatkan relevansi pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan global, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan global. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan biaya kuliah gratis telah diterapkan dengan cukup sukses secara keseluruhan. Proses pengalokasian dana yang sedikit terlambat dari jadwal, kebutuhan untuk memaksimalkan transmisi informasi terkait kebijakan, dan kebutuhan untuk anggota staf yang lebih banyak dari yang diantisipasi adalah semua tantangan yang harus diatasi selama pelaksanaan kebijakan.

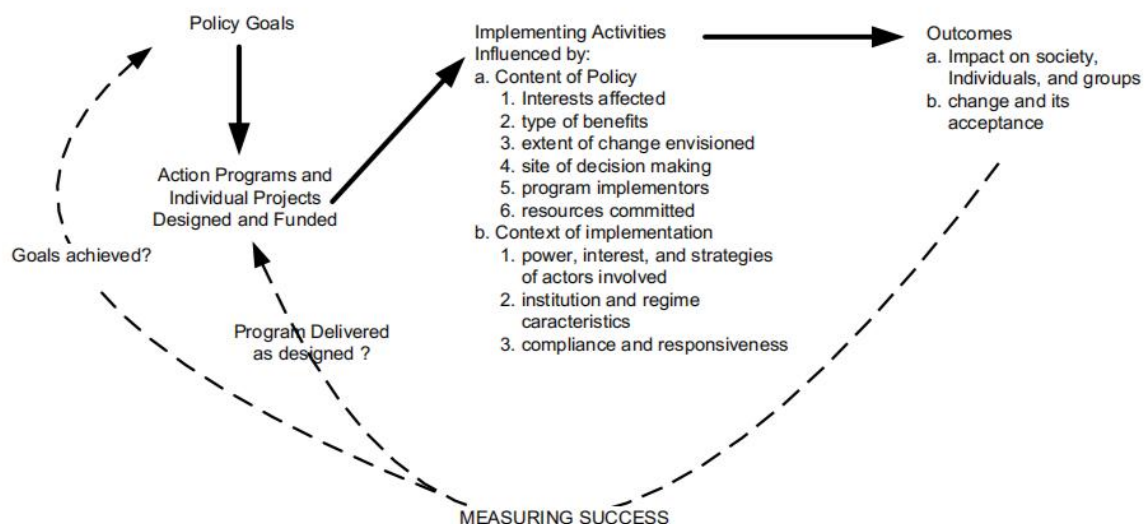
5	Yullya Putri Utami (2021)	Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah Untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau	Kualitatif	Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III	Pemerintah Kabupaten Lamandau mengadakan program beasiswa bagi para mahasiswa di Kabupaten Lamandau demi memajukan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lamandau. Program beasiswa ini sudah ada sejak tahun 2009 dan merupakan inisiatif dari Ir. Marukan yang merupakan Bupati Lamandau. Jumlah bantuan dana beasiswa yang diberikan sebesar Rp 4.200.000 setiap setahun sekali. Dalam implementasi program pemberuan beasiswa daerah untuk mahasiswa kabupaten Lamandau masih terdapat faktor penghambat dalam penyaluran bantuan, yaitu dimana para pihak donatur terlambat dalam menyalurkan dana kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau. Hal ini menyebabkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhambat dalam proses penyaluran dana.
---	---------------------------	---	------------	---	--

Tabel 1 Hasil Kajian Penulis, 2022

Tidak sedikit peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai implementasi beasiswa daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah masing-masing peneliti. Pada penelitian kali ini, peneliti memiliki beberapa hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti melakukan penelitian mengenai implementasi beasiswa daerah di Kabupaten Bogor, yaitu Beasiswa Pancakarsa yang diselenggarakan oleh DISPORA Kabupaten Bogor. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang sama dengan penelitian sebelumnya. Teori implementasi yang digunakan oleh peneliti adalah teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang cocok dengan pembahasan terkait implementasi Beasiswa Pancakarsa di Kabupaten Bogor tahun 2022 dan menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya.

## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 Implementasi Kebijakan



Bagan 1 Teori Implementasi Politik dan Administratif Grindle

Implementasi menurut Grindle (1980), adalah prosedur tindakan administratif yang luas yang dapat dilihat sampai batas tertentu. Selain itu, Grindle (1980) mencatat bahwa menetapkan tujuan dan sasaran, merencanakan jadwal kegiatan, dan mengalokasikan dana merupakan prasyarat untuk memulai proses implementasi. Metode yang dirancang Grindle untuk mengimplementasikan kebijakan publik disebut sebagai “*implementation as a political and administrative process*” atau "implementasi sebagai proses politik dan administratif", yang pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dilihat dari dua aspek, yakni:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Berdasarkan teori Grindle, kesuksesan dari implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlaksanaannya, kebijakan yang dimaksud terdiri atas:

- a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)
  1. Kepentingan yang mempengaruhi. Kepentingan yang mempengaruhi ini terkait dengan beragam kepentingan yang mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan.

2. Tipe manfaat. Isi kebijakan bertujuan untuk menunjukkan atau memperjelas bahwa suatu kebijakan harus mencakup berbagai manfaat yang menunjukkan dampak positif. Kepentingan yang mempengaruhi ini terkait dengan beragam kepentingan yang mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan.
3. Skala perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Skala yang jelas harus ada dalam penjelasan kebijakan tentang isinya.
4. Letak pengambilan keputusan. Apakah letak suatu program tepat, pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan sangat penting untuk implementasinya.
5. Pelaksanaan program. Seorang pelaksana kebijakan yang berpengetahuan dan cakap diperlukan untuk keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program.
6. Sumber daya yang digunakan. Agar implementasi kebijakan berhasil, diperlukan sumber daya pendukung.

b. Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

1. Kekuasaan. Kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat). Untuk memperlancar implementasi suatu kebijakan, penting juga untuk mempertimbangkan kekuatan atau kewenangan, kepentingan, dan taktik yang digunakan oleh para aktor yang terlibat.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana kebijakan itu diimplementasikan; Bagian ini menjelaskan ciri-ciri lembaga yang juga akan berdampak pada suatu kebijakan.
3. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana. Pada titik ini, sejauh mana kepatuhan dan respons implementasi kebijakan dapat dilihat.

Patel (2019) menjabarkan bahwa implementasi kebijakan dinilai sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu, pejabat, atau kelompok pemerintah maupun swasta yang dilakukan demi mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Parsons (1995) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan dan swasta, baik secara perseorangan maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Meter dan Horn dalam Grindle (1980), yang berpendapat bahwa tugas implementasi adalah menciptakan jaringan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik melalui tindakan organisasi pemerintah yang melibatkan berbagai kepentingan. pihak (*stakeholder* kebijakan).

Daniel Mazmian dan Paul Sabatier (Solichin Wahab, 1991) mengartikan implementasi sebagai pelaksanaan suatu kebijakan dasar yang pada umumnya



berbentuk undang-undang, tetapi bisa juga berbentuk perintah atau putusan eksekutif yang penting atau putusan badan peradilan. Keputusan yang dimaksud pada umumnya mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyuarakan secara tugas sasaran yang ingin dicapai, dan bagaimana cara untuk mengatur jalannya implementasi.

Menurut George C. Edward III implementasi kebijakan dapat dilihat melalui pendekatan permasalahan atau *implementation problems approach*. Dalam pendekatan masalah dikemukakan dua pertanyaan utama, yaitu faktor apa yang mendukung keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan dan faktor apa yang menghambat keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. George C. Edward III (dalam Subarsono, 2005) juga menyebutkan empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Keberhasilan sebuah implementasi menurut Lester dan Stewart Jr. dapat dilihat dari proses dan pencapaian tujuan-tujuan yang ingin diraih. Fungsi suatu implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab (1997) adalah sebagai pembentuk suatu hubungan atau interaksi yang memungkinkan tujuan yang dihasilkan sebagai suatu *outcomers*. Penyelenggaraan suatu kebijakan pada umumnya terdiri dari cara atau sarana yang dibentuk secara khusus dan ditujukan untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Winarno (2014) mengatakan bahwa program dari suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Iskandar (2012) dalam suatu kebijakan terdapat beberapa metode dalam

pelaksanaannya, yaitu aktivitas, program, aksi, ketetapan, dan sikap yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee Serrill Grindle yang dimana menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dilihat keberhasilannya dari proses dan tujuan capaian kebijakan tersebut. Alasan peneliti memilih teori Grindle karena pada penelitian kali ini peneliti membahas mengenai implementasi kebijakan beasiswa Pancakarsa yang telah berlangsung pada tahun 2022 dengan melihat proses dan capaian dari pengimplementasian beasiswa Pancakarsa.

## **1.7 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan bagian dari suatu penelitian yang memperjelas konsep yang digunakan oleh peneliti dan memudahkan peneliti dalam menerapkannya di lapangan (Singarimbun dan Effendi, 2011). Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah “Implementasi Program Beasiswa Pendidikan Pancakarsa”

### **1.7.1 Beasiswa Pendidikan**

Beasiswa merupakan suatu bantuan yang berbentuk finansial atau keuangan, terutama kepada mereka yang terdaftar di sekolah atau perguruan tinggi. Beasiswa memungkinkan para peserta didik untuk terus melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Bantuan beasiswa bertujuan untuk membantu menutupi pengeluaran atau biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik selama menempuh pendidikan.

Bantuan beasiswa diberikan bertujuan agar pendidikan lebih merata bagi setiap orang yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan, dan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan segar. Ini sangat penting bagi siswa yang menghadapi tantangan keuangan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana pemerintah secara aktif bekerja untuk meningkatkan standar pendidikan di semua provinsi, kota, dan kabupaten. Beasiswa pada umumnya diberikan dalam bentuk uang agar nantinya siswa dapat mengikuti kegiatan pendidikan dengan biaya yang lebih murah. Jumlah beasiswa yang diberikan kepada penerima manfaat bervariasi tergantung pada jenis bantuan yang diberikan; dapat berupa beasiswa penuh, setengah beasiswa, atau bantuan fasilitas belajar tertentu.

### **1.7.2 Program Pancakarsa**

Pancakarsa berdasarkan buku Sastra dan Politik karya Yoseph Yapi Taum diambil dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima dan karsa yang artinya kehendak, maka dapat diartikan Pancakarsa adalah lima kehendak. Maka Pancakarsa dapat diartikan sebagai lima kehendak atau ketetapan yang harus dijalankan.

Di Kabupaten Bogor terdapat program Pancakarsa yang dicetuskan oleh bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin dalam periode kepemimpinannya tahun 2018-2023. Terdapat lima tekad, yaitu Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun, dan Karsa Bogor Berkeadaban. Karsa Bogor Cerdas merupakan program pemberian bantuan yang menunjang kegiatan belajar mengajar bagi para peserta didik yang berprestasi dan

membutuhkan support finansial. Karsa Bogor Maju merupakan program strategis yang bertujuan mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Karsa Bogor Membangun memiliki tujuan mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah program yang sesuai dengan harapan pembangunan masyarakat. Karsa bogor sehat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat kabupaten Bogor dengan cara memberikan fasilitas penunjang kesehatan dan menjalankan program-program untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada. Karsa Bogor Berkeadaban memiliki tujuan mewujudkan kesalehan masyarakat Kabupaten Bogor dan mengurangi hal-hal yang dapat merugikan generasi berikutnya dan memajukan inisiatif terkait agama.

### **1.7.3 Karsa Bogor Cerdas**

Tujuan dari Program Karsa Bogor Cerdas adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing baik dalam skala nasional maupun internasional. Program Pancakarsa, khususnya Bogor Pintar Karsa, mencakup Kartu Bogor Pintar (Bodas). Siswa kurang mampu SD dan SMP yang terdaftar di Dapodik dan belum menerima bantuan Program Indonesia Pintar diberikan kartu Bodas. Selain itu, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bogor mengawal program Beasiswa Pancakarsa yang merupakan bagian dari program Bogor Pintar Karsa. Tujuannya adalah untuk mendukung pemuda Kabupaten Bogor yang berencana untuk kuliah atau sudah terdaftar di perguruan tinggi negeri dan swasta dengan bantuan keuangan.

Pada penelitian ini penulis fokus membahas salah satu program Karsa Bogor Cerdas, yaitu terkait pengimplementasian Beasiswa Pancakarsa di Kabupaten Bogor tahun 2022.

### **1.8 Operasional Konsep**

Terdapat batasan operasional pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini, seperti:

- a. **Kepentingan:** berkaitan dengan kekhawatiran yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan. Sejauh mana kebijakan berpotensi mengubah hubungan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat dinyatakan oleh Grindle (1980: 8). Berdasarkan indikator ini, implementasi suatu kebijakan memerlukan partisipasi berbagai pihak, dan sejauh mana kepentingan tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.
- b. **Tipe manfaat:** Suatu kebijakan yang dikembangkan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, memberikan dampak yang menguntungkan, mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan mampu mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat.
- c. **Skala perubahan yang ingin dicapai:** Jenis program yang dibuat untuk mencapai tujuan dapat berdampak besar pada perubahan penerima manfaat program. Secara umum, semakin sulit penerapan suatu kebijakan, semakin luas dan ekstensif perubahan yang diharapkan.
- d. **Letak pengambilan keputusan:** Letak pengambil keputusan atas suatu kebijakan yang akan dilaksanakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap bagaimana

kebijakan tersebut dijalankan. Apakah sudut pandang suatu kebijakan benar atau kurang tepat.

- e. Pelaksanaan program: Mengenai pelaksana program, periksa untuk memverifikasi apakah pelaksana tersebut telah disebutkan secara spesifik dalam suatu kebijakan. Komponen pelaksana memegang peranan penting dalam memastikan kebijakan ini berhasil diterapkan.
- f. Sumber daya yang dibutuhkan: Sumber daya yang ada menentukan apakah suatu kebijakan berhasil diimplementasikan. Sumber daya ini datang dalam bentuk staf, pengetahuan, dana, dan infrastruktur. Pelaksana program juga akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi jika mereka memiliki sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan tersebut.
- g. Kekuasaan: Kekuasaan dan kepentingan para pemain akan memainkan peran utama dalam menentukan apakah tujuan yang diharapkan tercapai selama fase implementasi. Dalam skenario ini, pihak yang paling mungkin terkena dampak dan mempunyai dampak terhadap proses implementasi adalah pelaksana. Beragamnya aksi yang terjadi di lapangan membuat kekuatan kepentingan dan strategi para pemain sangat terlihat jelas. Masing-masing pihak mengungkapkan kepentingannya melalui tindakan masing-masing pemain yang berkepentingan, meskipun tidak mungkin dikarakterisasi secara keseluruhan.
- h. Karakteristik lembaga dan rezim yang dibutuhkan: Pasti akan terjadi gesekan antara organisasi-organisasi yang kepentingannya terkena dampak ketika suatu program dilaksanakan. “Siapa mendapat apa” akan ditentukan melalui penyelesaian konflik; ini akan menentukan siapa mendapat apa. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai

indikator tidak langsung mengenai ciri-ciri otoritas atau lembaga yang melaksanakan program, baik dari segi keberpihakan maupun gaya kepemimpinan.

- i. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana: Menurut Grindle (1980), untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam kebijakan yang telah dibuat, para pelaksana harus responsif dan konsisten. Kejadian ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan peraturan ideal dan keadaan aktual. Disengaja atau tidak, selalu ada kelalaian dalam perawatan dan perhatian, oleh karena itu pemerintah daerah yang bertanggung jawab harus selalu melakukan pengawasan yang ketat. Sederhananya, diperlukan kesadaran yang tinggi, bukan ego sektoral atau sekadar mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila orang-orang yang terlibat tidak mematuhi atau melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.

## **1.9 Kerangka Berpikir**

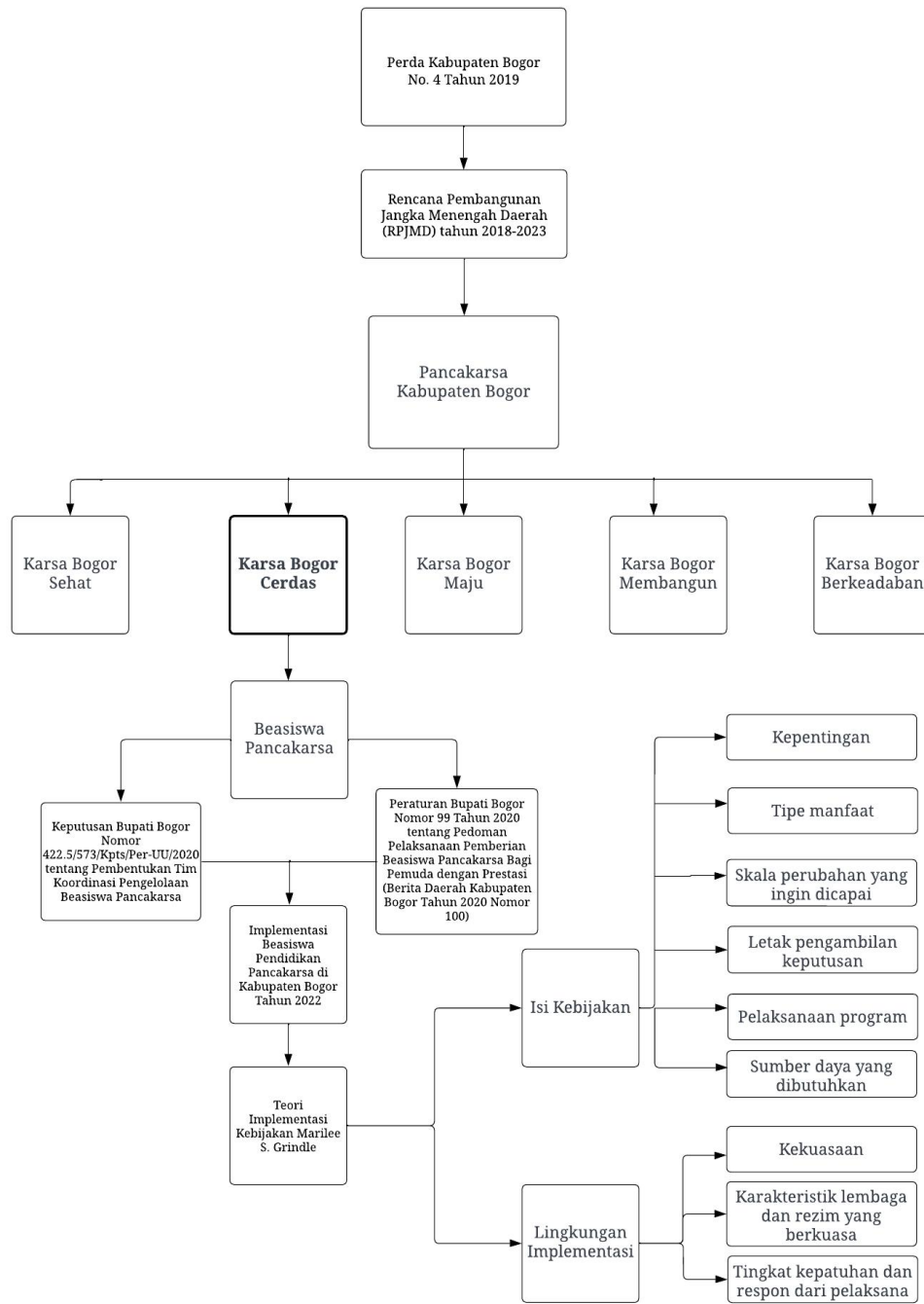
Kerangka berpikir, menurut Una Sekaran (dalam Sugiyono, 2012:65), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan banyak aspek yang telah diakui sebagai persoalan penting. Menemukan kekuatan dalam penelitian akan dimungkinkan oleh Kerangka Berpikir.

Kerangka berpikir adalah penjelasan yang berfungsi untuk mendaftar semua gejala yang ada saat ini dalam suatu proyek studi sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Saat membangun kerangka yang menginspirasi hipotesis, seorang peneliti harus mahir dalam teori-teori ilmiah yang menjadi landasan penalaran. Kerangka berpikir merupakan justifikasi yang memadukan antara teori, fakta, observasi,

dan studi literatur serta menjadi landasan dalam pembuatan artikel ilmiah. Kerangka ini dihasilkan saat menyajikan konsep kajian karena berfungsi sebagai landasan.

Ketika dihadapkan pada tuntutan untuk mengungkapkan fenomena atau topik yang diteliti, kerangka berpikirnya memadukan asumsi-asumsi teoritis dan logis untuk menjelaskan atau menghasilkan variabel-variabel yang diteliti dan hubungan antar variabel tersebut. Prinsip-prinsip penelitian dijelaskan menggunakan kerangka. Kerangka berpikir yang berbentuk diagram bertautan juga dapat dipandang sebagai suatu visualisasi. Akibatnya, kerangka berpikir dapat dianggap sebagai aliran logis yang meresapi penelitian. Meskipun demikian, poin-poin yang berkaitan dengan variabel juga dapat dimasukkan dalam kerangka acuan ilmiah. Variabel penelitian penting bagi subjek yang diteliti dan dapat dijelaskan lebih rinci dalam kerangka berpikir.





Bagan 2 Kerangka Berpikir

## **1.10 Metode Penelitian**

### **1.10.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, tergantung pada masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data kualitatif dan dideskripsikan secara deskriptif. Menurut Creswell (2009), metode penelitian kualitatif memerlukan upaya yang signifikan seperti pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data tertentu dari partisipan, pengolahan data secara induktif dari topik tertentu ke tema yang lebih luas, dan interpretasi makna data. Evaluasi dari penilaian sikap, pandangan, dan perilaku adalah komponen kunci dari metode kualitatif untuk penelitian. Dalam keadaan seperti ini, penelitian merupakan fungsi dari persepsi dan wawasan peneliti. Strategi penelitian semacam itu menghasilkan temuan yang non-kuantitatif atau tidak mampu menjadi sasaran analisis kuantitatif yang ketat. Wawancara mendalam, kelompok fokus, dan teknik proyektif sering digunakan.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan perilaku masyarakat, kejadian aktual, dan aktivitas tertentu secara mendalam dan rinci. Penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan semata-mata untuk menggambarkan suatu variabel yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki tanpa menantang keterkaitan antar variabel tersebut.

### **1.10.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor,

dan telah diperoleh data dan informasi lebih lanjut terkait Program Beasiswa Pancakarsa dan bagaimana implementasi dari beasiswa Pancakarsa.

### **1.10.3 Subjek Penelitian**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia subjek penelitian, merupakan orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Subjek penelitian adalah mendefinisikan subjek penelitian sebagai objek, benda atau orang yang dilampirkan data variabel penelitiannya, dan yang dipertanyakan (Arikunto, 2016).

Peneliti telah mengumpulkan data dan informasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam pelaksanaan program Beasiswa Pancakarsa yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sehubungan dengan fenomena atau kasus yang terjadi. Pihak yang memiliki kepentingan antara lain, perwakilan pihak penyelenggara program beasiswa Pancakarsa Bapak Hendar dan Bapak Ali selaku staff Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, Eca dan Hoiri selaku pendaftar beasiswa, dan Humeiro selaku penerima beasiswa Pancakarsa.

### **1.10.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Ketika melakukan penelitian manajemen pemerintahan di lokasi penelitian, penelitian kualitatif menggunakan fakta dan informasi yang disajikan sebagai teks, kata-kata tertulis, frasa, atau simbol untuk menggambarkan dan mewakili orang, kegiatan, dan peristiwa yang berkaitan dengan penelitian implementasi program beasiswa Pancakarsa Kabupaten Bogor tahun 2022.

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data primer pada penelitian kali ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak terkait Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, lembaga terkait pengimplementasian kebijakan, pendaftar dan penerima beasiswa Pancakarsa.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh oleh pihak lain. Data sekunder dapat berupa foto, arsip-arsip dokumen, atau laporan terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan pada penelitian kali ini diperoleh dari kajian literatur, e-book, jurnal yang diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan peneliti.

#### **1.10.5 Triangulasi**

Validasi keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi yang menggunakan metode lain. Untuk keperluan verifikasi atau perbandingan dengan data, pemeriksaan di luar data dari berbagai sumber merupakan metode triangulasi yang paling sering digunakan (Moleong, 2017). Terdapat empat teknik dalam triangulasi data, yaitu triangulasi sumber data, triangulasi metode, triangulasi penyelidikan, dan triangulasi teori. Pada penelitian kali ini, peneliti

menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode untuk menguji kevalidan data terkait permasalahan penelitian yang sedang diteliti.

#### **1.10.6 Teknik Pengumpulan Data**

Baik data primer maupun data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Teknik-teknik berikut yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data primer:

##### **a. Wawancara**

Wawancara menurut Nazir (1988) merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan pemandu wawancara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari pihak-pihak terkait.

Dalam mengumpulkan data terkait Implementasi Beasiswa Pancakarsa di Kabupaten Bogor Tahun 2022, peneliti telah melakukan kegiatan wawancara kepada pihak terkait, yaitu perwakilan pihak penyelenggara program beasiswa Pancakarsa Bapak Hendar dan Bapak Ali selaku staff Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, Eca dan Hoiri selaku pendaftar beasiswa, dan Humeiro selaku penerima beasiswa Pancakarsa.

### **b. Studi Pustaka**

Langkah awal dalam proses pengumpulan data adalah studi pustaka. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk menemukan data dan informasi dari dokumen, termasuk dokumen tertulis, rekaman fotografi dan visual, dan rekaman elektronik yang dapat membantu dalam proses penulisan. Temuan penelitian yang didukung oleh gambar atau teks ilmiah dan artistik yang ada juga akan lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2005).

#### **1.10.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk melakukan pengolahan dan penganalisisan data yang telah di peroleh dengan cara menyalurkan data dalam rancangan konsep sebagai dasar untuk dilakukannya analisis.

##### **a. Pengumpulan data**

Keseluruhan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti secara objektif dan disesuaikan dengan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan.

##### **b. Reduksi data**

Reduksi data Reduksi data melibatkan meringkas, memilih elemen yang paling signifikan yang relevan dengan topik studi, berkonsentrasi pada mereka, mencari tema dan pola, dan akhirnya menghasilkan gambar yang lebih baik untuk memfasilitasi pengumpulan data tambahan (Sugiyono, 2018).

**c. Penyajian data**

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bentuk-bentuk tertentu yang signifikan yang nantinya akan memudahkan peneliti dalam memahami data yang disajikan (Miles & Huberman, 2007).

**d. Penarikan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir bagi peneliti dalam penulisan metode penelitian. Penarikan kesimpulan juga merupakan bagian penting dari suatu kegiatan penelitian yang nantinya akan menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Proses penarikan kesimpulan disajikan dalam rangka untuk menganalisis serta meneliti data yang ada dari hasil penelitian yang telah dilakukan.